

K/c
Ba 90/00
Sia
P

SKRIPSI

GABRIEL SIALLAGAN

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI ELECTRONIC
COMMERCE (E – COMMERCE)**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE)



SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Isnaeni", written over a faint circular watermark of the University of Airlangga.

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.
NIP. 130 604 270

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gabriel", written over a faint circular watermark of the University of Airlangga.

Gabriel Siallagan
NIM. 039614296

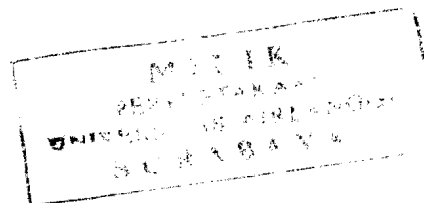
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya terjadinya suatu perjanjian adalah pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Kesepakatan itu mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian dengan adanya penawaran dan penerimaan. Persoalan yuridis yang timbul berkaitan dengan perkembangan teknologi dengan adanya perdagangan *e-commerce* ini mengharuskan dirombaknya aturan-aturan mengenai penawaran dan penerimaan transaksi perdagangan. Perdagangan melalui *e-commerce* dalam perdagangan internasional mengakibatkan aturan hukum perjanjian yang mengharuskan setiap perjanjian dilakukan secara tertulis menjadi kuno dan tidak relevan lagi untuk dipertahankan.
- b. *Data message* yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis di bawah tangan. Ini berarti bahwa kode-kode elektronik tertentu dapat dianggap sebagai pengganti tanda tangan. Agar dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maka *printed out data message* tersebut harus lebih dahulu dilegalisasi sebelum diterima sebagai alat bukti. Ini berarti bahwa masih diperlukan adanya dokumen yang asli



2. Saran

- a. Dari segi pelaku bisnis, selama belum ada kerangka khusus yang mengatur *e-commerce* para pelaku bisnis *e-commerce* harus mengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi dan memasukkan syarat-syarat dan ketentuan, terutama yang timbul karena sifat *e-commerce* dalam *web pages* mereka. Misalnya soal hukum yang berlaku dan yuridiksi. Untuk memastikan bahwa kelak pengadilan yang menerima telah terjadi kesepakatan. *Web pages* secara teknis, *software* harus didesign sedemikian rupa sehingga tentang penerimaan suatu penawaran dan identitas penerima tidak ada keraguan.

Dari segi pemerintah, seharusnya secepatnya mengambil suatu sikap yang jelas tentang *e-commerce* ini. Perkembangan *e-commerce* sedemikian pesat, sehingga sikap tersebut harus diambil secepat mungkin. Sikap politik tersebut harus dinyatakan dalam suatu *political will* untuk menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan harus ada bukti dokumen dan tanda tangan konvensional. *Political will* pemerintah ini dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun dalam suatu Keputusan Presiden. Apabila Pemerintah ingin menunjang berkembangnya *e-commerce* maka peraturan perundang-undangan harus mengakui alternatif dokumentasi secara elektronik, termasuk tanda tangan secara elektronik. Dalam menentukan dan implementasi *political will* tersebut dalam suatu

political action berupa produk peraturan dan kebijaksanaan, sebaiknya Pemerintah berpatokan pada prinsip-prinsip yang secara Internasional dan berlaku umum dalam bidang *e-commerce*.

- b. Sejauh ini ada cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi mengingat keterbatasan hukum positif yaitu *legislative solution* yaitu antisipasi yuridis terhadap perkembangan teknologi melalui peraturan perundang-undangan. Berbagai perkembangan dalam bidang teknologi yang menekan sistematika hukum dapat diatasi dengan mengadakan penafsiran ulang dan perubahan atau perluasan hukum yang berlaku sehingga dapat mencakup teknologi. Menafsirkan berbagai aturan hukum yang tidak sejalan dengan maksud pembentuknya (pembentuk undang-undang) dapat dilakukan asalkan masih berpangkal tolak pada inti dan aturan tersebut. Terhadap *legislative solution* peran ilmu perbandingan hukum menjadi dominan. Dalam hal ini pendidikan hukum sudah tidak zamannya lagi hanya sebatas memberikan pengenalan (fase mengenal) terhadap stelsel hukum asing, tetapi lebih jauh lagi mestinya telah mencoba memahami asas-asas dan kaidah-kaidah stelsel hukum asing tersebut (fase memahami) dan membanding-bandingkan *ius comperatum* dan *ius comperandum* (fase membandingkan) sehingga dapat memecahkan persoalan yang timbul dalam praktek hukum dan ilmu pengetahuan.